

ABSTRAK

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan dimana memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan dan pembinaan maka diharapkan kemampuan administrasi publik dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Selain itu pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan dua pokok permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan hambatan yang dihadapi oleh inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan upaya untuk mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan suatu simpulan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan memiliki wewenang diantaranya perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Meskipun sistem pengawasan pemerintahan di daerah telah berjalan cukup komperhensif perlu kita ketahui bersama bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih memiliki beberapa hambatan yaitu antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kendaraan operasional sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan kurang maksimal.

Kata kunci : Pelaksanaan, Tugas dan Wewenang, Inspektorat Daerah, Mengawasi Pemerintahan Daerah.